
**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM
MENANGGULANGI KERUSAKAN HUTAN LINDUNG DI KAWASAN KABUPATEN
ACEH SINGKIL**

Risda Jairina

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang mengalami kerusakan hutan, meski sudah banyak peraturan yang berlaku. Kurangnya perhatian dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil sehingga terjadinya aktifitas-aktifitas merusak hutan sangat berdampak buruk terhadap ekosistem, kesehatan, hingga terjadinya bencana alam seperti banjir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil dan apakah kendala yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan di kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Teori yang digunakan adalah teori sistem politik, konsep peran dan konsep hutan lindung. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil belum maksimal dalam melakukan perannya dikarenakan Peran Dinas Lingkungan dan Kehutanan dalam melakukan pemantauan, sosialisasi, melakukan tindakan pidana pelaku dan reboisasi atau penghijauan tidak dilakukan secara rutin sehingga masih terjadinya tindakan *illegal logging* dan perambahan hutan di hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Adapun kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal terdiri dari faktor minimnya anggaran dan faktor tidak terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan kendala eksternal terdiri faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah hutan agar ikut serta dalam menjaga lingkungan, terutama dalam mengawasi praktek-praktek *illegal logging* dan perambahan hutan di kawasan masyarakat masing- masing.

Kata Kunci: Peran Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, *Illegal Logging*

ABSTRACT

Aceh Singkil district is an area that has suffered forest damage, even though many regulations are in force. The lack of attention of the environmental and forestry services in dealing with the damage to protected forests caused by Aceh Singkil district so that the occurrence of forest-damaging activities has a very bad impact on the ecosystem, health, to the event of natural disasters such as floods. This research aims to find out how the role of the environmental service of living and forestry in mitigating the damage of protected forest in the area of Aceh Singkil district and whether the obstacles faced by the environment and forests service in Mitigating forest damage in Aceh Singkir district. The theories used are the theory of political systems, the concept of roles and the notion of protected forests. As for this research approach using qualitative methods. Primary data collection techniques through direct interviews with informants, while secondary data through documentation. The results of the research showed that the Department of Environmental Protection and Forestry in the management of damages to protected forests in the area of Aceh district Singkil has not maximized in performing its role due to the role of the Ministry of environmental protection and forestry in carrying out monitoring, socializing, committing criminal acts of perpetrators and refocus or greening is not carried out on a routine so that there is still illegal action of logging and increase of forest in the forest protection in the region of Aceh District Singkil. With regard to the obstacles faced by the environmental service of living and forestry in dealing with the damage of protected forests in the area of Aceh Singkil district are internal and external obstacles. Internal obstacles consist of minimum budgetary factors and non-realizable factors of economic well-being of the community. Whereas external barriers consist of low quality of human resources and low level of knowledge of the society. To the Ministry of Environment and Forestry to continue to raise public awareness in the conservation of forests and living environments, especially the communities living in forest areas to participate in environmental conservation, especially in monitoring the practices of illegal logging and forest proliferation in their respective communities.

Keywords: Environmental Services, Forestry, Illegal Logging

PENDAHULUAN

Aceh adalah salah satu provinsi yang diberkati dengan kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk keanekaragaman ekosistem hutan yang mencakup luas 3.3 juta ha, meliputi lebih dari 60 persen areal kawasan provinsi ini. Aceh mempunyai hutan yang sangat luas, yang terbentang dari ujung provinsi Aceh yang mulai dari pulau Weh hingga wilayah selatan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil termasuk Pulau Siemeulue. Namun setiap tahunnya mengalami degradasi hutan dengan luas hutan yang mencapai 3.004.352 hektar pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019, angka ini menurun menjadi 2.989.212 hektar, menandakan bahwa dalam setahun Aceh kehilangan 15.140 hektar hutan akibat dari deforestasi yang berupa aktivitas pembalakan liar dan ahli fungsi hutan (Hanafiah, 2020).

Kerusakan hutan atau deforestasi yang terjadi disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk diantaranya kebakaran dan aktivitas perambahan hutan. Faktor-faktor ini didorong oleh tingginya permintaan akan kayu dan produk hutan lainnya di pasar lokal, nasional, dan global. Selain itu, terjadi pula konversi permanen kawasan hutan untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, serta penggunaan lain di luar sektor kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan. Dampak negatif dari kerusakan hutan berpengaruh pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan dalam beberapa aspek dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Kerusakan hutan menyebabkan degradasi lapisan tanah, yang diperparah oleh erosi dan longsor saat musim hujan (Prawesti, 2016, hal. 1782).

Upaya perlindungan hutan perlu dilakukan secara serius untuk mengurangi kemungkinan timbulnya masalah di sekitar kawasan hutan. Saat ini di beberapa kawasan hutan Indonesia, dampak deforestasi sudah mulai terasa, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun campur tangan manusia. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang tidak tepat tidak hanya menimbulkan risiko bencana bagi masyarakat tetapi juga menyebabkan hutan tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh mempunyai peran dalam menanggulangi kerusakan hutan dan mengelola kehutanan. Dalam Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan hutan ditegaskan bahwa: "Pada setiap Unit Pengelolaan Hutan dibentuk organisasi KPH, yang menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan Hutan nasional dan Pemerintah Daerah provinsi. Organisasi KPH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan Hutan, meliputi: perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, dan pengendalian dan Pengawasan".

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Aceh yang mengalami kerusakan hutan, karena tindak *illegal logging* dan perambahan hutan. Kasus ini terjadi terutama pada hutan lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil yang menimbulkan kerusakan hutan, seperti *illegal logging* dan perambahan hutan yang dilakukan setiap tahunnya.

Pada tahun 2017 Perambahan hutan lindung di Anak Laut semakin marak terjadi, perambahan hutan guna untuk peralihannya menjadi kebun seluas 25 hektar hutan lindung menjadi gundul (Acehtrend, 2018). Pada tahun 2018 *illegal logging* terjadi hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil yang dilakukan oleh satah satu warga dengan barang bukti 5 kubik kayu lokal yang di oleh secara ilegal karena tanpa ada izin dokumen resmi (AntarAceh, 2018). Pada tahun 2019 *illegal logging* terjadi di Hutan Lindung Kecamatan Singkil Utara dilakukan oleh seorang warga, ditemukannya 5 keping kayu jenis sembarangan merah hasil olahan dengan panjang 10 meter, yang tidak memiliki izin di Daerah Kecamatan Singkil Utara (Serambinews.com, 2019).

Bedasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Pemerintah telah menetapkan hutan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan lindung dan hutan tetap dengan tujuan utama sebagai resapan air hujan, mengendalikan air banjir, mengendalikan erosi tanah dan tanah longsor, serta menghindari kekeringan. Namun realitanya hutan lindung dimanfaatkan oleh sejumlah orang, baik itu masyarakat ataupun pemerintah.

Teori Sistem Politik

Gabriel Almond menyebutkan bahwa kapabilitas sistem politik adalah kemampuan sistem politik untuk menghadapi tantangan, dinamika, serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu negara.

Adapun bentuk kapasitas sistem politik berdasarkan teori Gabriel Almond (Beddy Iriawan Maksudi, 2011: 376) adalah sebagai berikut :

1. Kapabilitas Ekstraktif yaitu kemampuan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia baik di dalam maupun di luar negeri. Kapasitas suatu sumber daya alam seringkali tetap potensial sampai dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah.
2. Kapabilitas Distributif yaitu sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian untuk dapat didistribusikan secara merata.
3. Kapabilitas Regulatif adalah kemampuan sistem politik dalam mengendalikan perilaku serta hubungan antar individu ataupun antar kelompok yang ada didalam sistem politik. Dalam konteks kapabilitas ini sistem politik dilihat dari banyaknya regulasi (undang-undang dan peraturan) yang dibuat secara intensi penggunaannya karena peraturan pada hakikatnya dibuat untuk dilaksanakan. Selain itu kapabilitas regulatif berkaitan dengan kapabilitas ekstraktif dalam proses Ekstraksi membutuhkan regulasi.
4. Kapabilitas Simbolik yaitu kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat. Semakin diterima kebijakan yang di buat oleh pemerintah, semakin baik kapabilitas simbolik sebuah sistem politik.
5. Kapabilitas Responsif yaitu proses politik yang terdapat hubungan antara output dan input, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana di pengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai input akan menjadi ukuran kapabilitas responsif.

Konsep Peran

Menurut pandangan Siagian Sondang (2003: 142-150), pemerintah memiliki peran yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang menjadi perhatian adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor, serta pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci, peran-peran tersebut di uraikan sebagai berikut:

1. Sebagai stabilisator, peran pemerintah adalah menyadari bahwa perubahan tidak mengakibatkan pergolakan sosial, memantapkan dan menjaga stabilitas nasional agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan, program, serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan lancar.
2. Sebagai inovator, pemerintah harus berperan sebagai sumber inovasi dan hal-hal baru. Keabsahan (legitimacy) yang kuat menjadi prasyarat penting agar pemerintah efektif dalam peran ini. Dalam konteks manajemen pembangunan, ini merujuk pada wawasan, metode, sistem, dan yang terpenting cara berpikir baru. Sehingga metode, atau langkah-langkah yang dibutuhkan, yakni pemecahan masalah dan bereantasi pada aksi.
3. Sebagai modernisator, pemerintah berperan dalam memobilisasi masyarakat yang mau berkembang menuju modernisasi tanpa melupakan cara dan gaya hidup tradisional untuk kehidupan modern. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengelola kekayaan alam yang memiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia

yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.

4. Sebagai pelopor, pemerintah harus memiliki panutan (role model) bagi seluruh masyarakat pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin. Ini mencakup kepeloporan dalam penegakan keadilan dan disiplin, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban dalam kepentingan negara.
5. Sebagai pelaksanaan sendiri, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pembangunan karena banyaknya pertimbangan seperti keamanan, modal yang terbatas, kapasitas tenaga kerja yang tidak memadai, dan kurangnya minat.

Konsep Hutan Lindung

Hutan lindung (protection forest) merupakan salah satu kategori hutan yang memiliki peranan utama sebagai perlindungan sistem pendukung kehidupan, bertujuan untuk mengatur aliran air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan erosi, mencegah masuknya air laut ke daratan, dan juga memelihara kesuburan tanah (Sumaryono, 2017, hal 10). Selain itu, Keberadaan kawasan hutan lindung mendapatkan banyak perhatian baik tingkat regional maupun internasional karena fungsinya yang bukan hanya sekedar untuk menjaga kelestarian, namun juga menjadi pengendali global warming (Sumaryono, 2017, hal 12).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan salah satu tempat dan kondisi realitas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil. Dimana alasan peneliti memilih lokasi ini, karena daerah tersebut merupakan tempat sumber data utama yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu terjadinya

tindakan merusak hutan seperti *illegal logging* dan perambahan hutan di hutan lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil sehingga bencana alam yang setiap tahun terjadi seperti banjir dan longsor.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Selanjutnya, untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara tidak terstruktur, studi pustaka, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Aceh Singkil

Peran dalam konteks ini mengacu pada serangkaian aturan yang terdapat dalam struktur organisasi dan dalam kehidupan masyarakat. Suatu instansi memiliki posisi dan melaksanakan tindakan tertentu untuk mencapai visi dan misi organisasi. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

A. Pemantauan Hutan

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti menemukan bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum maksimal dalam melakukan pemantauan, dikarenakan dalam melakukan pemantauan masih jarang dilakukan. Bukan hanya itu kadang pemantauan dilakukan dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait tindakan *illegal logging* dan perambahan hutan di hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Dapat dibayangkan apabila pemantauan ini dilakukan lebih sering maka akan banyak didapatkan pelaku *illegal logging* dan perambahan hutan.

Hubungan peran selaku stabilisator (Siagian 2003: 142-150) dengan penelitian ini dalam menjalankan peran sebagai stabilisator peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memantapkan dan menjaga stabilisator nasional agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan, program, serta kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik adalah melakukan pemantauan dalam sebulan tiga kali, dalam melakukan pemantauan hutan pihak Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan beberapa unsur. Tujuan melakukan pemantauan hutan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan hutan hutan lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini penting guna memberikan suatu penilaian tentang bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai stabilisator dalam menanggulangi kerusakan hutan Lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan dari hasil penelitian yaitu Dinas Lingkungan Dan Kehutanan tidak mengadakan pemantauan hutan rutin dalam sebulan, tetapi mengadakan sidak beberapa kali dalam setahun. Sehingga masih sering terjadinya tindakan *illegal logging* dan perambahan hutan di hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil.

B. Melakukan Sosialisasi

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti menemukan bahwasannya peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan dan tidak menebangi hutan, dan mengetahui bagaimana bahayanya tindakan *illegal logging* dan perambahan hutan. Masyarakat yang awam masih banyak yang belum mengetahui pentingnya pengelolaan hutan dan pelestarian hutan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berperan penting dalam mengubah pola pikir masyarakat yang awam dengan cara sering melakukan kegiatan sosialisasi. Tetapi sayangnya sosialisasi tidak ada dilakukan. Jika sosialisasi sering dilakukan mungkin secara perlahan masyarakat akan paham tentang pentingnya pengelolaan hutan, pelestarian hutan, dan bahayanya *illegal logging* dan perambahan hutan. Bukan hanya itu saja dengan seringnya dilakukan sosialisasi maka dapat membuat masyarakat enggan dalam melakukan tindakan merusak hutan lindung seperti tindakan *illegal logging* dan perambahan hutan.

C. Melakukan Penindakan Kepada Pelaku Kerusakan Hutan

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti menemukan bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mampu dalam melakukan tindak pidana kepada pelaku kerusakan hutan Lindung di Kabupaten Aceh Singkil masih lemah atau belum maksimal dikarenakan dalam prakteknya pihak Dinas Lingkungan dan Kehutanan hanya menangkap para pelaku *illegal logging* dan perambahan hutan dilapangan. Padahal ada cukong atau pelaku yang beraksi di luar lapangan yang sebenarnya harus di tangkap. Dikarenakan dalang dari *illegal logging* dan perambahan hutan itu adalah penyuruh atau cukong.

Hubungan Kapabilitas Simbolik menurut Gabriel Almond dengan konteks penelitian ini dapat dijelaskan melalui aspek kemampuan simbolik. Dalam hal ini, kemampuan simbolik dapat dilihat dari indikator bahwa kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah dapat diterima oleh masyarakat, yang pada gilirannya mencerminkan sejauh mana kapabilitas simbolik pemerintah. Dengan kata lain, jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapatkan respon positif dari masyarakat, maka kapabilitas simboliknya dianggap baik. Dalam penelitian ini adanya kebijakan tentang tindak pidana kepada pelaku kerusakan hutan dinilai sangat baik. Hal ini dilakukan untuk efek jera kepada pelaku *illegal logging* dan perambahan hutan. Efek jera bukan hanya di peruntukkan kepada pelaku yang telah melakukan tindakan tetapi kepada orang lain yang mempunyai aktifitas dalam hutan. Hal ini akan membuat enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidanya berat.

D. Penghijauan dan Reboisasi

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti menemukan bahwasannya peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melakukan reboisasi yang bertujuan untuk memulihkan fungsi ekologis hutan, mengurangi erosi tanah, meningkatkan kualitas tanah, dan menyelamatkan keanekaragaman hayati belum maksimal dikarenakan sangat jarang dilakukan. Reboisasi seharusnya dilakukan dikarenakan melihat Kabupaten Aceh Singkil setiap tahunnya dilanda bencana banjir.

Penerapan Peran pelopor (Siagian 2003: 142-150) mengacu pada individu yang menjadi contoh teladan bagi orang lain, yang memberikan contoh yang patut diikuti oleh semua elemen masyarakat atau yang berfungsi sebagai figur yang berada di garis depan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu memainkan peran yang mendorong semua komponen masyarakat untuk ikut serta secara positif dan aktif dalam upaya menangani kerusakan hutan lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil. Seperti melakukan reboisasi atau penghijauan di lahan kritis. Bukan hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mampu memberikan teladan mengenai produktivitas dan kinerja yang efisien, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengadopsi pemikiran, cara berfikir, dan tindakan dalam usaha penanggulangan kerusakan hutan lindung serta dalam upaya melestarikan hutan lindung.

Kendala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Menanggulangi Kerusakan Hutan Lindung di Kawasan Kabupaten Aceh Singkil

Kenadala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas kendala internal dan kendala eksternal sebagai berikut:

A. Kendala Internal

1. kurangnya fasilitas yang memadai dalam melakukan operasi pemantauan

Dimana bentuk penerapan peran pelaksanaan sendiri (Siagian 2003: 142-150) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan mempunyai banyak pengahambat dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung salah satunya anggaran yang terbatas. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui Dalam melakukan sebuah kegiatan untuk menanggulangi kerusakan hutan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan memerlukan biaya operasional dan peralatan operasional untuk menjangkau areal hutan sehingga dalam melaksanakan kegiatan mereka sering mengalami kendala anggaran. Minimnya biaya operasional membuat kegiatan ini tidak berjalan dengan baik, dengan demikian pelaku dengan leluasa dalam melakukan aksinya.

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil kendala anggaran dikarenakan dalam melakukan pemantauan memerlukan alat peralatan operasi kelengkapan dan biaya operasional, sehingga kami kesulitan dalam melaksanakan pemantauan hutan ke lapangan. Adapun alat peralatan operasi kelengkapan dan biaya operasional yang diperlukan itu seperti alat pemantauan dari jauh drone, satelit, sensor lingkungan, kendaraan, dan peralatan keamanan, untuk biaya operasioal seperti biaya transportasi udara dan dan darat, biaya transportasi, biaya logistik lapangan dan biaya pemantauan spesifik Dengan kurangnya biaya operaasional dan peralatan operasional, para pelaku sering kali beroperasi. Tidak mudah dalam melakukan pemantauan hutan, kami harus masuk ke hutan dan menjelajahi hutan. Kemudian tidak sendiri dalam melakukan pemantauan hutan. Mereka dibantu oleh masyarakat serta pihak kepolisian. Mereka memerlukan fasilitas dalam melakukan pemantauan hutan.

2. Tidak Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi Bagi Masyarakat

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat dilihat bahwasannya masyarakat mengambil kayu untuk di jual, membuat rumah serta menjadikan hutan lindung sebagai kebun sawit. mereka menggunakan mesin pemotong kayu yang canggih sehingga dapat menggundulkan hutan dalam waktu singkat. Masyarakat tidak ada sistem memilih pohon-pohon yang mana masih muda dan sudah tua untuk ditebangi semua dibabat habis. Berbeda dengan masyarakat jaman dulu memotong pohon dengan pisau ataupun parang secara manual sehingga tidak semua pohon dapat di tebangi secara mudah. Bukan hanya itu masyarakat tidak mudah mendapatkan izin dari pemerintah.

Hubungan antara kapabilitas distributif menurut Gabriel Almond dengan peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung dikawasan Kabupaten Aceh Singkil. Dalam penelitian ini di temukan bahwasannya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mampu mendistribusikan hutan dengan cara mengelola sumber daya hutan lindung untuk di lestarikan. Sehingga tidak terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat membuat masyarakat melakukan penebangan hutan tanpa mengetahui dampak dari *illegal logging* dan perambahan hutan masyarakat mengambil kayu untuk di jual, membuat rumah serta menjadikan hutan lindung sebagai kebun sawit. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya kapabilitas distributif peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil belum tercapai.

B. Kendala Eksternal

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Tingkat pengetahuan masyarakat dan sumber daya manusia akan sangat berdampak pada pelestarian hutan. Tingkat pengetahuan masyarakat juga menjadi indikator untuk menilai seberapa efektif kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan sumber daya manusia yang baik dan terlatih dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi upaya perlindungan hutan, serta mampu membangun inovasi-inovasi inovatif untuk mengatasi tantangan dan masalah yang terkait dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini di temukan bahwasannya Pentingnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang kurang diakomodasi oleh kurangnya sumber daya manusia. Upaya untuk

melibatkan masyarakat lokal dalam perlindungan hutan seringkali terhambat karena keterbatasan tenaga dan dana. Padahal, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan dapat menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan. Tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah dan kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan sangat rendah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan terkait peran dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Kabupaten Aceh Singkil memiliki beberapa peran yaitu melakukan pemantauan, melakukan kegiatan sosialisasi, melakukan penindakan kepada pelaku, dan melakukan penghijauan atau reboisasi. Beberapa kendala yang dihadapi dinas lingkungan hidup dan kehutanan dalam menanggulangi kerusakan hutan lindung di kawasan Kabupaten Aceh Singkil adalah kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala internal pertama yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dalam melakukan operasi pemantauan hutan, Kendala kedua yaitu tidak terwujudnya kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Sedangkan kendala eksternal seperti rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan sumber daya manusia.

SARAN

Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah hutan agar ikut serta dalam menjaga lingkungan, terutama dalam mengawasi praktek-praktek *illegal logging* di kawasan masyarakat masing- masing.

DAFTAR PUSTAKA

- AntarAceh (2019) *Polhut Aceh Singkil Amankan 5 kubik kayu ilegal*. <https://aceh.antaranews.com/berita/43236/polhut-singkil-amankan-5-kubik-kayu-ilegal>. Diakses 5/02/2019
- Ayu Mahara. (2016). *Kapabilitas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Menangani Masalah Illegal Logging di Kecamatan Atu Lintang*. 1-105. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.
- Beritakini.co. (2020). *Polda Limpahkan Dua Tersangka Kasus Perambahan Hutan Produksi ke Kejari Aceh Singkil, SalahSatunya Kadiskes*. Singkil:Beritakini.co. <https://beritakini.co/news/polda-limpahkan-dua-tersangka-kasus-perambahan-hutan-produksi-ke-kejari-aceh-singkil-salah-satunya-kadiskes/index.html>. Diakses 3/10/2020
- Beddy Irrawan Maksudi. 2011. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiardjo, M. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta :Gramedia
- Hanafiah, Junaidi (2020). *Aceh Kehilangan Tutupan Hutan, HAKA : Sehari 41Hektar. Banda Aceh* : <https://www.mongabay.co.id/2020/02/04/aceh-kehilangan-tutupan-hutan-haka-sehari-41-hektar/>. Diakses 4/02/2020
- KanalAceh.(2020) *Di duga berasal dari hutan lindung 3 kubik kayu diamankan di polisi di Aceh Singkil*. <https://www.kanalaceh.com/2020/07/22/diduga-berasal-dari-hutan-lindung-3-kubik-kayu-diamankan-polisi-di-aceh-singkil/>. Diakses 22/07/22
- Prawesti, W. (2016). *Politik kehutanan dalam penegakkan hukum lingkungan pengendalian pengurangan resiko bencana*. *jurnal kajian politik dan masalah pembangunan* , Volume 12 No 1: 1781-1791.
- Rafillah, Dilla. (2020). *Peran Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dalam Melakukan Pencegahan kerusakan hutan di Kawasan Hutan Lindung Bulu Ponre Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutan (Studi Desa Salebba Kec. Ponre Kab Bone)*. 1-78. Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- Sagian, Sondang P. (2003). *Teori dan Praktik kepemimpinan*. Jakarta: Rinaka Cipta.
- Subarna, T. (2011). *Faktor yang mempengaruhi masyarakat menggarap lahan di hutan lindung: Studi kasus di Kabupaten Garut Jawa Barat*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(4), 265-275.
- Suryadi, Novan. "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 2 (2020): 425-436.